

**Penerapan *Human Security* oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani
Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

ADILA MALHA

14323028

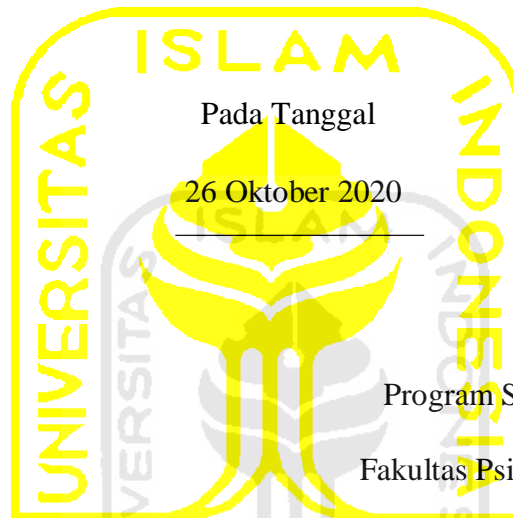
**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Penerapan *Human Security* oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019)

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia




Ketua Program Studi


Hangga Fathana, S.IP., B.Int St., M.A.

Dewan Penguji

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A
2. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:


Nama : Adila Malha
No. Mahasiswa : 14323028
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Penerapan *Human Security* oleh Pemerintah Vietnam dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia (2016-2019)

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Oktober 2020

Yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
A33AHF656414049
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Adila Malha

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan serta rezeki untuk melanjutkan S1 ini hingga akhir. Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan untuk Sayyidina Maulana Muhammad S.A.W. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Abi dan Mama

Abi, Mama terima kasih untuk semua bimbingan, nasehat, dukungan, doa, cinta dan kasih sayang serta harapan Mama dan Abi kepada saya. Terima kasih juga untuk semua kepercayaan yang telah Abi dan Mama berikan sehingga saya dapat menyelesaikan ini semua dengan baik. Semoga dengan selesainya studi S1 ini dapat membuat Abi dan Mama bahagia dan bangga.

Adik-adik

Terimakasih kepada adik-adikku untuk semua dukungan, kasih sayang dan doa yang diberikan kepada kakaknya. Semoga kalian bisa menjadi lebih baik dari kakak, contohlah apa yang baik dari kakak jika tidak ada satupun kebaikan dari kakakmu ini maka jadikanlah contoh kedepannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama.

Keluarga Besar

Terima kasih untuk doa, nasehat dan dukungan serta bantuan yang telah diberikan sampai saat ini.

HALAMAN MOTO

Setiap orang memiliki jalan dan pelajaran hidupnya masing-masing. Tugas kita adalah mensyukuri apa yang sedang kita jalani saat ini. Belajar menjadi lebih baik, tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat, mensyukuri segala nikmat yang diberikan dan menikmati hidup serta berbahagia dengan apa yang telah dan sedang kita lakukan.

Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk kecewa. Karena dibalik itu semua Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk setiap kita. Melebihi apa yang kita inginkan dan harapkan. Jangan pernah berburuk sangka kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang paling mengerti apa yang dibutuhkan oleh hambaNya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah *Subhanahu wa ta'alla* yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa salam*, keluarga, sahabat beserta pengikutnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nahori, S.Psi., M.A.g selaku Dekan Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int St., M.A selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Juga Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat untuk segala kebingungan dan ke Gundahan selama menjalani kuliah. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan melindungi Bapak beserta keluarga.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mana telah memberikan begitu banyak nasehat, dukungan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan serta kekhilafan. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A selaku Dosen Penguji Skripsi terima

kasih untuk segala saran dan masukan yang telah Bapak berikan. Semoga Allah senantiasa melindungi Bapak dan membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang lebih mulia.

5. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A selaku Dosen Penguji Skripsi terima kasih untuk segala saran dan masukan yang telah Ibu berikan. Semoga Allah senantiasa melindungi Ibu dan membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan-kebaikan lainnya yang lebih mulia.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Ilmu Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti.
8. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah membantu dalam pengurusan izin dan surat-surat kebutuhan penelitian, serta memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Kedua orangtua tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan nasehat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Adik-adik tersayang yang tiada hentinya memberikan doa dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian skripsi penulis ataupun menjadi penyemangat: Kak Izziya, Azka Azkiya, Kemala, Qodri, Adelia, Rizka Varazita, Mbak Sinta, Wilda Zulvia, Ita Aina, Bang Ilham, Farihah dan Ghifari serta teman-teman semua yang telah dengan senang hati menjadi tempat penulis dalam berkeluh kesah. Terima kasih kalian, semoga Allah

senantiasa melindungi dan membalas kebaikan kalian.

12. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama ini, semoga apa yang kalian impikan dan harapkan dikabulkan oleh Allah SWT.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan baik yang disebutkan namanya maupun tidak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan penelitian yang baru dan inovatif.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Adila Malha

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Signifikansi Penelitian	7
1.5 Cakupan Penelitian	8
1.6 Kajian Pustaka	10
Isu Perdagangan Manusia.....	10
Kebijakan Perdagangan Manusia Negara Vietnam	11
1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan.....	14
Konsep Human Security.....	14
1.8 Metode Penelitian	16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Alat Pengumpulan Data.....	17
1.8.4 Proses Penelitian	18

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA.....	19
2.1 Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap Perdagangan Manusia.....	20
2.2 Dampak dari Penerapan Kebijakan Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Vietnam	29
BAB III PENERAPAN <i>PERSONAL SECURITY</i> DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM	36
3.1 <i>Personal Security</i> Sebagai Konsep	37
3.2 Kebijakan Pemerintah Vietnam dan Pencapaian <i>Personal Security</i> dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	38
3.3 Penerapan <i>Personal Security</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Vietnam dalam Menangani <i>Human Trafficking</i>	41
3.3 Tabel Analisis Kasus	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA.....	xv

DAFTAR TABEL

<u>3.3 Tabel Analisis Kasus</u>	45
---------------------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

ARF	: ASEAN Regional Forum
ASEAN	: Association of Southeast Asia Nation
COMMIT	: Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking
HAM	: Hak Asasi Manusia
IOM	: International Organization for Migration
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
TVPA	: Trafficking Victims Protection Act
UNIAP	: United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking
UNDP	: United Nation Development Programme
UNICEF	: United Nation Children's Fund
UNODC	: United Nation Offices on Drugs and Crime
WV	: World Vision

ABSTRAK

Kasus perdagangan manusia banyak terjadi di negara-negara berkembang dan negara konflik, termasuk di Vietnam. Setiap tahunnya kasus ini mengalami peningkatan jumlah korban, beberapa dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 70% korban dari perdagangan manusia ini adalah anak-anak dan perempuan di mana mereka hidup di daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Terdapat beberapa negara yang mengecam Vietnam karena Vietnam tidak dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia dengan baik. Pemerintah Vietnam memiliki beberapa kebijakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di negaranya, yang tercantum dalam Law No. 60/2011/QH12. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Human Security menurut UNDP dengan mengambil salah satu aspek yang terdapat di dalamnya yaitu personal security.

Kata kunci: Vietnam, Perdagangan manusia, Kebijakan Law No. 60/2011/QH1, Human Security, Personal Security

ABSTRACT

Many cases of human trafficking occur in developing and conflict countries, including in Vietnam. Every year this case has increased the number of victims, some of them are children and women. More than 70% of the victims of this trafficking are children and women who live in border areas that are hit by poverty and low education levels. There are several countries that criticize Vietnam because Vietnam is not considered unable to solve human trafficking problems properly. The Vietnamese government has several policies to resolve cases that occur in the country, which are listed in Law No. 60/2011 / QH12. In this study the authors used the concept of Human Security according to UNDP by taking one of the aspects contained in it, namely personal security.

Key words: Vietnam, human trafficking, Law No. 60/2011 / QH1, Human Security, Personal Security.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia terhadap anak dan perempuan banyak terjadi di hampir seluruh negara bagian, termasuk juga di Asia Tenggara. Dalam kasus ini ada tiga negara ASEAN yang terlibat kasus eksploitasi manusia dan pihak ASEAN sendiri juga sudah memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap ketiga Negara ini, adapun Negara yang terlibat dalam kasus ini adalah, Kamboja, Vietnam dan Thailand. (Kranrattanasuit 2014)

Penulis memilih negara Vietnam untuk dibahas karena setiap tahunnya perdagangan manusia di Vietnam terus meningkat, yaitu pada tahun 2016 ditemukan 234 korban, di tahun 2017 terdapat 350 korban, dan puncaknya pada tahun 2018 mencapai 420 korban (State 2018) dan 739 orang lainnya ditemukan di Inggris (Nguyen 2019). Di mana para korban perdagangan manusia di Vietnam adalah anak-anak dan perempuan.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Negara Thailand, perdagangan manusia di Thailand muncul dengan beragam motif, diantaranya bermotif ancaman dan penculikan. Perdagangan perempuan marak lebih dominan terjadi untuk industri prostitusi di beberapa kota besar di Thailand. Praktek perdagangan di Thailand memiliki istilah *repeating case*, yaitu kasus yang terus berlanjut, dalam kasus ini individu yang menjadi korban akan mengajak teman-temannya atau pihak lain untuk melakukan hal yang sama seperti dirinya, hal ini disebabkan

karena materi yang diperoleh cukup menggiurkan (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2016).

Kebijakan pemerintah Thailand telah mengeluarkan beberapa strategi yang digunakan untuk menangani kasus perdagangan manusia di negaranya. Diantaranya adalah *5P Startegy Framework* atau yang dikenal juga dengan sebutan 5P yang terdiri dari, *Policy* (Kebijakan), *Presecution* (Penuntutan), *Protection* (Perlindungan), *Prevention* (Pencegahan) dan *Partnership* (Kemitraan) (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2016) sedangkan di Negara Vietnam, dalam sepengetahuan peneliti masih belum ada. Penulis belum menemukan kebijakan Pemerintah Vietnam yang mengatur tentang pencegahan perdagangan manusia di negaranya. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Thailand yang sudah memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia di negaranya.

Terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan munculnya perdagangan manusia di negara-negara berkembang dan negara maju. Berbagai faktor sosial yang jelas mempengaruhi kehidupan manusia adalah ketimpangan ekonomi dalam kelas sosial masyarakat. Ketimpangan sosial dapat berupa perampasan ruang-ruang produktif seperti ruang kerja, pembagian peran dan seterusnya.

Hal di atas bisa saja menyentuh peluang manusianya yang secara genetik mengalami *streatype* maupun bias di tengah pusaran politik dan budaya, termasuk kuasa patriarki. Oleh sebab itu perempuan seringkali mengalami pemisahan kelas, ketergantungan dan desakan ekonomi yang mendorong perempuan dimanfaatkan

oleh keadaan yang dekat dengan praktek perdagangan dengan motif iming-iming yang menjanjikan kebutuhan hidup (Muhammad 2019).

Maka praktek perdagangan di Vietnam ini adalah salah satu diantara gambaran latar belakang para korban eksploitasi dan subordinasi. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di negara-negara yang menerapkan budaya patriarki di mana perempuan tidak memiliki kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan menggantungkan nasibnya kepada laki-laki. Maka yang akan terjadi adalah marginalisasi terhadap hak-hak perempuan, eksploitasi dan kekerasan pada perempuan (Muhammad 2019).

Selanjutnya indikator lainnya yang melatarbelakangi kasus perdagangan yang terjadi di Negara Vietnam adalah rendahnya pendidikan, peluang kerja bagi perempuan, dan terjadi ketimpangan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan di atas rata-rata. Menurut PBB ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perdagangan manusia di Vietnam yakni, faktor ekonomi, termasuk: kemiskinan dan hutang, kurangnya kesadaran, pendidikan, masalah keluarga, dan pengaruh eksternal seperti nilai-nilai konsumsi, dan pengaruh dari teman sebaya (Larsen 2011).

Para wanita dan anak-anak dijual untuk dijadikan budak seks, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi anak sebagai budak atau kurir dan untuk penjualan anggota tubuh (Alvionitasari 2016). Selanjutnya, para korban akan dikirim ke beberapa Negara di Asia Timur, Eropa dan Amerika. Mereka akan diiming-imingi dengan pekerjaan dan gaji yang besar, sehingga banyak dari mereka terjebak dan masuk kedalam kasus ini.

Perdagangan manusia sejatinya melanggar kodrat manusia di mata hukum. Artinya eksploitasi termasuk pelanggaran hukum atas hak asasi manusia (*human rights*). Secara hukum perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang cukup memprihatinkan dan kurang mendapatkan kebijakan publik di negara-negara bagian Asia Tenggara terutama di Vietnam. Sejauh peneliti mengungkap kasus diatas, dari beberapa data primer yang diperoleh peneliti yaitu, antara tahun 2011-2015 para korban diantaranya merupakan anak kecil dibawah umur dan perempuan (NcMara 2015).

Perdagangan manusia menjadi permasalahan yang cukup serius di internal Vietnam dan Asia Tenggara. Ada sekitar 3000 orang anak dibawah umur yang diperjual-belikan ke Inggris, rata-rata mereka berusia di bawah 18 tahun. Mereka semua dikirim oleh sindikat perdagangan manusia internasional, mereka akan dipekerjakan sebagai pelaku prostitusi, kurir narkoba ataupun tindak kriminal lainnya (NcMara 2015).

Para sindikat ini akan meyakinkan para orang tua dan korban, bahwa mereka akan mendapatkan upah yang tinggi dan perlakuan yang baik selama mereka bekerja di sana. Tetapi, para korban eksploitasi manusia ini hidup dalam tekanan dan perlakuan yang sangat tidak pantas dan mereka tidak mendapatkan bayaran seperti yang dijanjikan (NcMara 2015). Seperti halnya yang terjadi di Inggris, terdapat 13.000 jiwa yang diperjual belikan seperempat dari mereka merupakan warga Negara Vietnam, dan berdasarkan laporan dari Lembaga Anti Perbudakan Internasional menyatakan bahwa hampir semua korban perdagangan manusia masuk kedalam industri narkoba, terutama ganja yang mana 80%

diantaranya adalah anak-anak berkewarganegaraan Vietnam (Thanh Nien News 2016).

Perdagangan manusia merupakan sebuah masalah besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Vietnam. Ada peningkatan jumlah yang cukup signifikan dalam perdagangan manusia dari Vietnam ke Inggris. Pada tahun 2012 terdapat 135 orang yang diperdagangkan ke Inggris dan jumlah korban terus meningkat. Di tahun 2018 korban perdagangan manusia dari Vietnam mencapai 739 orang. Vietnam termasuk dalam *top three countries* dunia dalam masalah perdagangan manusia (Nguyen 2019).

Pada enam tahun terakhir kasus perdagangan di Vietnam, negara tujuan utamanya adalah Inggris, mayoritas para korban adalah anak-anak, perempuan dan orang dewasa. Mereka tidak hanya diperdagangkan ke Inggris saja, namun beberapa negara Eropa lainnya seperti Jerman, Rusia dan Prancis juga menjadi negara tujuan perdagangan manusia ini, tujuan utama mereka diperdagangkan ke tiga negara ini tidak jauh berbeda dengan tujuan perdagangan ke Inggris. Di sana mereka akan dipekerjakan sebagai buruh seks atau eksploitasi seksual (Nguyen 2019).

Permasalahan lain muncul ketika Pemerintah Vietnam belum memiliki Komisi Perlindungan HAM di negaranya, cukup logis jika hal ini menjadi salah satu alasan mengapa di Vietnam masih terdapat banyak kasus perdagangan manusia atau eksploitasi manusia hingga pada tahun 2019. Pemerintah Vietnam

hanya meratifikasi beberapa konvensi kemanusiaan atau konvensi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Internasional (Thontowi 2019, 119).

Dari beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Vietnam, hanya ada dua konvensi yang membahas tentang perlindungan anak dan perempuan. Namun, menurut pemerintah ASEAN meratifikasi sebuah konvensi masih belum cukup dan belum menjamin tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di setiap negara anggota ASEAN. Setiap negara anggota memerlukan lembaga-lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di setiap negaranya, di ASEAN sendiri hanya beberapa negara saja yang memiliki Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia, namun Vietnam bukan salah satu negara yang memiliki Lembaga Perlindungan HAM (Thontowi 2019, 119).

Penulis mengambil permasalahan dalam kurun waktu dari tahun 2016-2018 karena dalam kurun waktu tiga tahun ini jumlah perdagangan manusia di Vietnam meningkat secara signifikan, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu diakhir tahun 2018 jumlah korban perdangan ini meningkat tiga kali lipatnya dari jumlah kasus sebelumnya, yang mana pada tahun 2016 jumlah tersebut berada di angka 234 orang kemudian pada tahun 2018 menjadi 739 orang (Nguyen 2019). Dalam hal ini, penulis akan menyoroti bagaimana perkembangan dan upaya penyelesaian perdagangan manusia oleh pemerintah Vietnam.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya penanganan kasus perdagangan manusia dipandang dari sudut pandang *human security*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk

1. Menjelaskan apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Vietnam dalam menangani kasus yang terjadi di negaranya.
2. Menganalisa penerapan *human security* dalam upaya yang dilakukan Pemerintah Vietnam.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak yang belum membahas secara rinci bagaimana peranan dan langkah-langkah apa saja yang diambil oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus eksploitasi anak dan perempuan di negaranya. Penelitian ini akan diperkuat oleh teori atau konsep yang digunakan dalam menganalisa keefektifan upaya Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus yang terjadi di Vietnam.

Setiap pemerintah wajib untuk melindungi keamanan setiap warga negaranya. baik mereka yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Vietnam melindungi setiap warga negaranya dari ancaman-ancaman yang mengancam keselamatan setiap warganya.

Penelitian ini juga penting dilakukan untuk melihat seberapa jauh Pemerintah Vietnam menerapkan *personal security* disetiap kebijakannya. Dalam kasus ini penulis akan melihat seberapa serius Pemerintah Vietnam dalam melindungi keamanan warga negaranya dari ancaman-ancaman yang akan

mengancam keamanan individu setiap warga negaranya. Karena menurut *personal security* negara wajib melindungi keamanan dan keselamatan setiap individunya.

Dalam penelitian ini akan menyinggung tentang penyebab terjadinya atau timbulnya perdagangan manusia di Vietnam serta bagaimana peranan Pemerintah Vietnam dalam menangani dan menanggulangi kasus tersebut mengingat jumlah korban perdagangan manusia semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penelitian ini menyinggung upaya apa saja yang telah Pemerintah Vietnam lakukan untuk menangani permasalahan perdagangan manusia.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ranah hubungan internasional, konflik yang terjadi di Vietnam membahas tentang peran Pemerintah Vietnam sendiri dalam menangani kasus perdagangan anak dan perempuan pada tahun 2016-2019. Fokus kajian dalam periode 2016-2019, sebab terjadinya fluktuasi angka terhadap kasus perdagangan manusia di Vietnam yang semakin meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi insiden yang membuat Vietnam mendapat kecaman dari Negara Inggris. Terhitung jumlah korban pada tahun 2016 mencapai 230 kasus, tahun 2017 meningkat 350 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 bertambah 420 kasus (State 2018). Pada tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya penulis tidak menemukan data yang menyebutkan korban perdagangan manusia secara spesifik pertahunnya. Namun, yang penulis temukan diantara tahun 2011-2015 terdapat 3000 kasus perdagangan manusia ke Inggris 80% diantaranya adalah berkebangsaan Vietnam (NcMara 2015).

Peneliti juga menghimpun data hasil identifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Inggris. Total jumlah korban perdagangan warga Vietnam di Inggris mencapai angka 739 kasus dan pada tahun 2019 ditemukan 39 orang meninggal dunia di dalam sebuah truk kontainer yang ditemukan di Inggris (Nguyen 2019).

Pemerintah Vietnam sejauh ini sudah mencoba untuk menangani kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat diantara tahun 2016-2019, dalam kasus ini Pemerintah Vietnam sendiri dinilai sangat lamban untuk menekan angka kasus tersebut di negaranya sendiri, di mana kelemahan politik Pemerintah Vietnam sering kali menjadi pertanyaan dan kritikan bersama di mata negara-negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, baik di mata hukum maupun di kancah *International Human Right*. Alasan tersebut cukup logis untuk diterima sebagai alasan dari beberapa penyebab melemahnya payung hukum di dalam praktek perdagangan yang tidak beradab.

Dalam penelitian ini penulis menghimpun data para korban dari situs resmi Pemerintah Amerika Serikat, karena penulis menemukan data yang cukup komplit mengenai perkembangan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam. Pada saat melakukan pencarian data korban, penulis tidak menemukan data-data terkait jumlah korban perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam yang dihimpun oleh ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Bagaimanapun juga alasan tersebut pantas menjadi kritik, saran dan kepedulian bersama sesama umat manusia dengan maksud menjunjung tinggi

nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi Pemerintah Vietnam. Di mana Pemerintah Vietnam sampai saat ini belum terkonfirmasi adanya suatu lembaga hukum yang bergerak secara khusus di bidang Komisi Perlindungan HAM. Kembali peneliti tegaskan jika syarat di atas cukup kuat menggambarkan Negara Vietnam masih kurang memuaskan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

1.6 Kajian Pustaka

Isu Perdagangan Manusia

Berdasarkan pada data UNICEF terhadap perdagangan manusia yang terjadi di Negara-negara Asia, termasuk di dalamnya data eksploitasi terhadap perempuan dan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000. Para korban eksploitasi seks adalah anak-anak. Sekitar 10.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya di kawasan Asia Tenggara. Lintas Perdagangan tidak manusiawi ini, melewati perbatasan-perbatasan negara agar lebih mudah dalam operasinya (Brown 2005).

Buku yang berjudul *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, yang ditulis oleh Mangai Natarajan, dideskripsikan bahwa perdagangan manusia merupakan sebuah kasus yang sering terjadi di dalam maupun di luar perbatasan sebuah negara dan biasanya kasus ini terjadi karena disebabkan oleh kemiskinan dan diskriminasi gender, perempuan-perempuan dari negara-negara miskin yang sering kali menjadi korban dalam kasus perdagangan manusia (Natarajan 2015, 118).

Dalam perdagangan manusia, perempuan menempati jumlah yang paling tinggi dalam kasus perdagangan manusia, mereka dimanfaatkan untuk melakukan

kerja paksa, baik yang bersifat seksual, fisik, maupun kekerasan psikologis. Faktor penekan yang menyebabkan *trafficking in persons* meliputi kondisi ekonomi, politik, dan sosial dalam negara asal yang mendorong seseorang untuk melakukan migrasi demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Natarajan 2015, 118).

Dalam buku *Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices* yang dikeluarkan oleh *United Nations*, menjelaskan tentang bagaimana perubahan dari respon perdagangan manusia di Asia yang berfokus pada perdagangan perempuan dan anak-anak. Pada awal tahun 1990-an permintaan perdagangan manusia semakin meningkat baik di dalam maupun luar negeri. Situasi ini dimanfaatkan oleh para sindikat kejahatan transnasional khususnya sindikat perdagangan manusia internasional untuk memfasilitasi transfer manusia khususnya perempuan dan anak-anak dari negara-negara di kawasan Asia, salah satunya adalah Vietnam (United Nations 2005).

Kebijakan Perdagangan Manusia Negara Vietnam

Pada tahun 2016 lalu Pemerintah Vietnam mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan sebuah upaya untuk mengurangi kasus perdagangan manusia di negaranya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, salah satu upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan kesadaran masyarakatnya hanya sebatas seremonial yaitu dengan menetapkan Hari Nasional Menentang Perdagangan Orang setiap tanggal 30 Juli. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini akan berlangsung sampai tahun

2020 dengan mengajak masyarakat Vietnam untuk menangani bersama perdagangan manusia yang terjadi di negara mereka (Lovett 2016).

Memperkuat referensi kajian pustaka dalam penelitian ini, peneliti mengeneralisir kebijakan negara-negara di Asia dengan buku yang berjudul Hubungan Internasional di Asia Tenggara yang ditulis oleh Bambang Cipto. Diterangkan bahwa sebagian besar negara-negara ASEAN menganggap permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan politik dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan tersebut. Perdagangan manusia pun mengalami perkembangan yang cukup pesat penyebabnya adalah meningkatnya permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di Kawasan Asia Tenggara, dan posisi Negara Vietnam merupakan salah satu negara tujuan bagi para pedagang manusia (Cipto 2006, 142).

Dalam upaya untuk menangani permasalahan isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN pernah melakukan pertemuan yang diselenggarakan oleh ARF (*ASEAN Regional Forum*) yang pada saat itu dilakukan berturut-turut pada tahun 2000-2001 di Singapura, Seoul dan Kuala Lumpur (Cipto 2006, 142).

Dalam pertemuan yang dilakukan di Seoul menghasilkan kesepakatan mengenai dampak dari kejahatan transnasional terhadap keamanan negara-negara anggota ARF dan untuk mengatasi kejahatan perdagangan manusia memerlukan kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Adapun pertemuan yang dilakukan di Kuala Lumpur untuk memberikan himbauan kepada negara-negara ARF dan mendorong mereka untuk

menandatangani UN “*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*” (Cipto 2006, 142).

Menariknya, sebagai pengecualian di dalam kebijakan pemerintah dalam negeri Vietnam sendiri adalah Vietnam bukan salah satu negara yang memiliki Lembaga Perlindungan HAM (Thontowi 2019, 119).

Setelah dikeluarkannya kebijakan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* maka capaian yang seharusnya sesuai dengan harapan untuk menekan angka kasus perdagangan manusia di Negara Vietnam belum dapat dikatakan berhasil, mengingat jumlah korban perdagangan di Vietnam pada tahun 2018, tercatat 739 kasus (Nguyen 2019).

Sebagai seorang akademis yang mengemban tanggung jawab keilmuan, peneliti akan melakukan analisis-kritis terhadap beberapa tinjauan pustaka lainnya, yang mana sejauh pemahaman peneliti, kajian terhadap penelitian maupun hasil riset tentang perdagangan manusia di Vietnam masih belum ada. Maka dari itu, tinjauan pustaka ini akan membantu dan mendukung baik secara kritik eksternal maupun internal dalam penelitian skripsi ini.

Di mana penulis melakukan riset, olah data (*primer*) dalam melakukan penelitian untuk mencari upaya-upaya yang telah Pemerintah Vietnam lakukan dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Namun, dari beberapa tinjauan pustaka ini belum ada yang membahas tentang penerapan *human security* dalam menangani kasus perdagangan manusia. Penulis juga akan

mengkritik upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam dengan pendekatan *personal security* yang belum ada dalam tinjauan pustaka ini.

1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan

Konsep Human Security

Dalam menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam penulis akan menggunakan konsep *Human Security*. *Human Security* berbicara bahwa keamanan tidak hanya berlaku untuk melindungi negara namun manusia juga perlu untuk dilindungi. *Human security* melakukan sebuah upaya pengalihan perhatian dari keamanan negara menjadi keamanan individu (United Development Programme 1994).

United Nations Development Programme (UNDP) membagi *human security* menjadi tujuh area diantaranya adalah; *economic security* (keamanan ekonomi), *health security* (keamanan kesehatan), *food security* (keamanan pangan), *environmental security* (keamanan lingkungan), *community security* (keamanan komunitas), *personal security* (keamanan pribadi) dan *political security* (keamanan politik). UNDP mengatakan bahwa pasca perang dingin masalah keamanan bukan saja tentang militer dan perang namun juga menyangkut masalah kehidupan yang terbagi dalam tujuh area yang telah penulis sebutkan diatas (Persaud 2013, 141).

Human Security mempunyai beberapa tipe salah satunya adalah *Personal Security* yang didalamnya memuat tentang bagaimana manusia juga mempunyai beberapa isu yang mengancam keamanan personal mereka, salah satu isu tersebut

adalah Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*). Salah satu fokus dari *personal security* adalah *sexual harassment*, di mana dalam prakteknya sedang menjadi sorotan dunia, saat ini banyak penyintas yang terbuka menceritakan ataupun memberikan pengalamannya terhadap hal tersebut, banyak dari mereka adalah korban dari perdagangan manusia (United Development Programme 1994).

Dalam penelitian ini *personal security* menjadi gagasan utama untuk memperluas konsep keamanan, dari keamanan negara ke manusia maupun secara individu. Fokus penelitian ini ada pada *personal security* karena *personal security* merupakan satu-satunya pendekatan yang dampaknya dapat dilihat dan diukur secara langsung, yang berkaitan dengan kebijakan yang menyangkut masalah *human security*. Berbeda dengan pendekatan yang lain, seperti *economic, health, food, environment, politic* dan *community* keenam pendekatan ini tidak selalu memberikan dampak yang langsung terhadap kebijakan yang berkaitan dengan *human security*, di mana bisa saja pendekatan ini dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan lain yang berada pada sektor ekonomi, sosial maupun kesehatan.

Menurut UNDP, *personal security* memiliki beberapa pola yang penting mengenai hak-hak dasar dan kebebasan dalam kehidupan manusia secara individu. Dalam permasalahan ini penulis menggunakan konsep *human security* untuk mengkritisi upaya Pemerintah Vietnam dalam menangani masalah di negaranya apakah upaya yang dilakukan sudah memenuhi kriteria *personal security* menurut UNDP. Penerapan *human security* akan dilihat melalui pendekatan *personal security*. Menurut UNDP, kriteria dari *personal security* itu adalah ketika tidak ada lagi kekerasan baik fisik maupun non-fisik, pelecehan

seksual, intimidasi dan kejahatan kriminal (United Development Programme 1994).

Maka, dalam skripsi ini akan melihat bagaimana upaya penanganan kasus *human trafficking* yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam, apakah hal-hal yang dimaksud oleh UNDP sudah tersedia atau belum dalam penanganan kasus tersebut. Mengingat kasus yang terjadi di Vietnam adalah kasus yang mengancam keselamatan dan nyawa para masyarakatnya, maka pemerintah Vietnam harus menerapkan *human security* untuk melindungi setiap warga negaranya dari ancaman-ancaman yang akan mengancam keamanan dan keselamatan setiap warga negaranya. Karena, kasus *human trafficking* di Vietnam sudah mengancam keamanan dan keselamatan setiap warga negara yang menjadi korban. Kasus tersebut juga mengancam nyawa para korban perdagangan manusia Vietnam. Kasus-kasus tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci di bab selanjutnya.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif, dimana penulis akan menjelaskan secara deskriptif analisis tentang permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam skripsi nanti. Penulis menggunakan metode kualitatif karena mendekati metode dalam penelitian dan penulisan skripsi. Penulis juga melakukan studi pustaka untuk memperkuat argumentatif dan kritik sumber dalam penulisan skripsi.

Peneliti melakukan riset yang lebih menekankan kepada deskripsi suatu rumusan masalah dengan analisis kritis terhadap sumber-sumber ilmiah dalam proses penelitian skripsi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder.

Metode kualitatif juga bisa diartikan untuk membangun generalisasi dari sebuah fenomena dan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian atau riset. Selain itu, metode ini banyak digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian di masyarakat yang sebelumnya tidak terdapat penjelasan dan output dari penelitian ini adalah makna dari fenomena atau peristiwa yang penulis teliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian skripsi ini mengkaji indikasi dan faktor-faktor eksternal maupun internal terhadap kasus eksploitasi perdagangan manusia di Vietnam.

Objek dari penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan-kebijakan hukum internasional dan relevansi kebijakan pemerintah negara Vietnam itu sendiri dalam merevitalisasi kebijakan hukum yang menentang perdagangan manusia oleh organisasi internasional maupun lembaga hukum Pemerintah negara Vietnam.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini akan menggunakan studi pustaka, untuk memperkuat argumennya penulis akan mempelajari permasalahan yang akan dibahas melalui buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan tema

penelitian. Penulis mengambil metode ini karena penulis beranggapan bahwa metode pengambilan data yang akan digunakan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan dan menjawab penelitiannya. Dalam metode pengambilan data ini kemungkinan penulis tidak akan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke Negara objek penelitian, kemungkinan besar dalam penelitian ini penulis hanya akan mengamati melalui tulisan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian nanti, penulis akan menganalisis data menggunakan metode kualitatif, dimana penulis akan menggunakan konsep *human security* untuk menganalisa permasalahan ini, dengan pendekatan *personal security*. Penulis akan melakukan studi literatur dalam menganalisa permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk memperdalam lagi jawaban dari rumusan masalah dan juga untuk mengetahui, apakah sebelumnya sudah ada penelitian yang sama dengan apa yang sedang diteliti penulis saat ini.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH VIETNAM TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, kejahatan ini sangat sulit terdeteksi karena beberapa hal. Kasus perdagangan manusia banyak terjadi di negara-negara berkembang dan negara konflik, termasuk di Vietnam. Setiap tahunnya kasus ini mengalami peningkatan jumlah korban, beberapa dari mereka adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 70% korban dari perdagangan manusia ini adalah anak-anak dan perempuan di mana mereka hidup di daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (Lan 2015).

Permasalahan perdagangan manusia kemudian ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Vietnam, hal ini ditunjukkan dengan kecaman Pemerintah Vietnam kepada para pelaku perdagangan manusia. Pada bab II ini akan diuraikan lebih lanjut tentang persoalan perdagangan manusia di Vietnam dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia.

Pemerintah Vietnam memiliki beberapa kebijakan dalam pencegahan dan perlawanan terhadap perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam tercantum pada salah satu undang-undang negara mereka yaitu pada Law No. 66/2011/QH12 (United Nation 2011).

Selain itu, Pemerintah Vietnam menjalin beberapa kerjasama dan meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan keamanan manusia dan konvensi yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional. Dalam penanganannya Pemerintah Vietnam juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional dan beberapa negara ASEAN dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia yang saat ini terjadi di negaranya (Thontowi 2019, 119). Kebijakan-kebijakan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bab II ini beserta kegagalan dan keberhasilan yang telah Pemerintah Vietnam capai dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi di negaranya.

2.1 Kebijakan Pemerintah Vietnam terhadap Perdagangan Manusia

Permasalahan lain muncul ketika Pemerintah Vietnam belum memiliki Komisi Perlindungan HAM di negaranya, cukup logis jika hal ini menjadi salah satu alasan mengapa di Vietnam masih terdapat banyak kasus perdagangan manusia atau eksploitasi manusia hingga pada tahun 2019. Pemerintah Vietnam hanya meratifikasi beberapa konvensi kemanusiaan atau konvensi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia Internasional. Dari beberapa konvensi yang diratifikasi oleh Pemerintah Vietnam, hanya ada dua konvensi yang membahas tentang perlindungan anak dan perempuan (Thontowi 2019, 119).

Namun, menurut pemerintah ASEAN meratifikasi sebuah konvensi masih belum cukup dan belum menjamin tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di setiap negara anggota ASEAN. Setiap negara anggota memerlukan lembaga-lembaga khusus yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di setiap negaranya, di ASEAN sendiri hanya beberapa negara saja yang memiliki

Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia, namun Vietnam bukan salah satu negara yang memiliki Lembaga Perlindungan HAM (Thontowi 2019, 119).

Pemerintah Vietnam sejauh ini sudah mencoba untuk menangani kasus perdagangan manusia yang semakin meningkat diantara tahun 2016-2018, dalam kasus ini pemerintah Vietnam sendiri dinilai sangat lamban untuk menekan angka kasus tersebut di negaranya sendiri, di mana kelemahan politik Pemerintah Vietnam sering kali menjadi pertanyaan dan kritikan bersama di mata negara-negara yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, baik di mata hukum maupun di kancan *International Human Right*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat Vietnam tentang bahaya dari perdagangan manusia (IOM UN MIGRATION n.d.).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam adalah dengan menetapkan Hari Nasional Menentang Perdagangan Orang, setiap tanggal 30 Juli. Upaya ini akan berlangsung sampai pada tahun 2020, dengan mengajak masyarakatnya untuk menangani perdagangan manusia secara bersama-sama yang terjadi di negara mereka (IOM UN MIGRATION n.d.).

Pada tahun 2011 Pemerintah Vietnam mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga-lembaga yang mengatur Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia secara lebih terpadu dan terstruktur. Isi dalam undang-undang tersebut adalah mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia dan tindakan lain yang melanggar hukum atau

undang-undang tentang pemberantasan perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penerimaan, verifikasi, perlindungan dan dukungan untuk para korban perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam beserta jajarannya bertanggungjawab atas perlindungan dan penyembuhan para korban (United Nation 2011).

Undang-undang tersebut masuk ke dalam Law No. 66/2011/QH12 yang dikeluarkan pada 12 Maret 2011, tertulis dalam *Human Trafficking Prevention and Combat* yang tercantum dalam *Prime Ministerial Decision 1427/QĐ-TTg* yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011 tentang *the Action Program on Prevention*. Pemerintah Vietnam juga mengatur tentang perlawanan terhadap kejahatan dalam perdagangan manusia, undang-undang ini diatur dalam *Prime Ministerial Decision 217/QĐ-TTg* tertanggal 6 September 2011 tentang *the National Targeted Program* tentang pencegahan dan perlawanan kejahatan pada periode 2012-2015. Pada tahun 2004 Perdana Menteri Vietnam juga mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri yang mengatur program aksi pencegahan dan perlawanan terhadap kejahatan terkait pada perdagangan anak dan perempuan (Lan 2015, 8-9).

Dalam peraturan perundang-undangan ini membahas tentang usaha yang dilakukan Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Terdapat beberapa pasal yang menjelaskan kebijakan-kebijakan dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di Vietnam. Adapun peraturan-perturan tersebut tertulis dalam pasal empat (4), pasal lima (5) dan pasal enam (6).

Pemerintah Vietnam juga memberikan perlindungan terhadap para korban, peraturan ini tertulis dalam pasal tujuh (7) dan pasal delapan (8) (United Nation 2011).

Dalam pasal-pasal tersebut Pemerintah Vietnam mengatur tentang usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia, dimulai dengan cara mengatasinya dan bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada para korban. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal empat (Prinsip Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia) berisikan
 1. Mengambil tindakan yang komprehensif untuk mencegah, mendeteksi dan menangani perbuatan yang ditentukan dalam Pasal 3 dari undang-undang ini.
 2. Segera menyelamatkan, melindungi dan menerima, memverifikasi secara akurat dan memberikan dukungan kepada korban. Untuk menghormati hak dan kepentingan yang sah para korban, untuk tidak menstigmatisasi atau mendiskriminasi mereka.
 3. Menjalankan peran dan tanggung jawab individu, keluarga, komunitas, lembaga, dan organisasi untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.
 4. Untuk mencegah, menangani secara akurat dengan tepat dan benar dalam menangani tindakan-tindakan seperti yang tercantum dalam pasal tiga dalam Undang-undang ini.

5. Mempromosikan kerjasama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia sesuai dengan Konstitusi dan hukum Vietnam dan berdasarkan pada hukum dan praktek internasional.
- b. Pasal Lima (Kebijakan Negara Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia)
1. Penanggulangan dan pemberantasan perdagangan manusia merupakan bagian dari pemberantasan dan pencegahan kejahatan dan kejahatan sosial dan kedua hal ini digabungkan ke dalam pelaksanaan program pembangunan sosial ekonomi lainnya.
 2. Mendorong lembaga, organisasi dan individu baik dari dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi dan bekerjasama dan membiayai kegiatan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia dan mendukung para korban untuk: mendorong individu dan organisasi domestik untuk mendirikan lembaga yang memberikan dukungan terhadap korban berdasarkan hukum.
 3. Memuji dan menghargai lembaga, organisasi dan individu dengan kinerja yang luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia: memastikan aturan pemerintah dan kebijakan di bawah hukum bagi orang-orang yang meninggal atau menderita kerusakan pada kesehatan dan tempat tinggal mereka ketika berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia.

4. Negara setiap tahunnya mengalokasikan anggaran dana untuk pekerjaan pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia.

c. Pasal Enam (Hak dan Kewajiban Korban)

1. Meminta lembaga, organisasi atau individu yang kompeten dalam mengambil tindakan untuk melindungi para korban atau kerabat mereka yang ingin memiliki kehidupan atau mereka yang terancam untuk memiliki kehidupan, kesehatan, kehormatan, martabat, atau harta benda mereka dilanggar.
2. Menerima dukungan dan perlindungan menurut undang-undang ini.
3. Diberikan kompensasi atas kerusakan menurut undang-undang.
4. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia kepada lembaga, organisasi dan individu.

Pasal selanjutnya menerangkan usaha Pemerintah Vietnam dalam upaya pencegahan perdagangan manusia yang telah terjadi di negaranya, adapun upaya-upaya ini dijelaskan pada pasal-pasal berikut.

a. Pasal Ketujuh (Informasi, Komunikasi dan Pendidikan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia)

1. Informasi, komunikasi dan pendidikan tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu, keluarga, lembaga, organisasi, dan komunitas untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia; untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap

perdagangan manusia dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.

2. Informasi, komunikasi dan pendidikan mencakup:
 - a. Kebijakan dan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.
 - b. Trik dan kerugian dari tindakan yang ditentukan dalam pasal 3 undang-undang ini.
 - c. Bagaimana bersikap dalam kasus yang diduga perdagangan manusia.
 - d. Tindakan dan pengalaman dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.
 - e. Tanggung jawab setiap individu, keluarga, kelompok, organisasi untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia.
 - f. Tidak mendiskriminasi dan menstigmatisasi para korban.
 - g. Konten lainnya berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.
3. Informasi, komunikasi, dan pengetahuan dilakukan melalui:
 - a. Pertemuan dan pembicaraan tatap muka.
 - b. Penyediaan bahan tertulis
 - c. Media massa.
 - d. Aktifitas dalam institusi pendidikan.
 - e. Sastra, seni, komunikasi dan kegiatan kebudayaan lainnya.
 - f. Bentuk hukum lainnya.

4. Mengembangkan jaringan penghubung akar rumput: untuk memobilisasi partisipasi aktif dari organisasi massa dan sosial.
 5. Peningkatan informasi, komunikasi dan pengetahuan untuk perempuan, pemuda, remaja, anak-anak, murid/pelajar dan penduduk perbatasan, pulau, pedalaman dan daerah terpencil, daerah dengan kesulitan sosial ekonomi dan area dengan banyak kasus perdagangan manusia.
- b. Pasal Delapan (Konseling Tentang Pencegahan Perdagangan Manusia)
1. Memberikan pengetahuan hukum tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.
 2. Memberikan informasi tentang trik perdagangan manusia dan melatih perilaku dalam menghadapi kasus-kasus yang diduga perdagangan manusia.
 3. Memberikan informasi tentang hak dan kewajiban korban dan bagaimana melakukan hak dan kewajiban tersebut.

Pemerintah Vietnam telah aktif berpartisipasi dalam beberapa lembaga yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia salah satu diantaranya adalah *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT), dan juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga PBB, seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *United Nation on Drugs and Crime* (UNODC), *International Organization for Migration* (IOM), *United Nation Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) dan *World Vision* (WV),

Vietnam juga menjalin perjanjian bilateral dengan beberapa negara dalam menangani kasus ini, diantaranya adalah Laos, Kamboja dan Malaysia, dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan dalam melawan perdagangan manusia di negaranya (Lan 2015, 9).

Pada tahun 2016-2018 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengklasifikasikan Vietnam kedalam *Tier 2* dalam kelompok perdagangan manusia. Menurut Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Vietnam dinilai tidak memasuki standar dalam memutus kasus perdagangan manusia di negaranya. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Vietnam melaporkan bahwa terjadi peningkatan upaya dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya, dibandingkan dengan laporan dari periode sebelumnya walaupun pada saat itu Vietnam tetap berada dalam *Tier 2*. *Tier 2* merupakan negara-negara yang tidak memperhatikan dan memenuhi TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) namun pemerintah negara tersebut terus mengupayakan untuk menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang termasuk kedalam TVPA (U.S. Departmen of State 2018).

Lebih dari 70% korban perdagangan manusia di Vietnam adalah perempuan dan anak-anak dari daerah perbatasan yang dilanda kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa laporan mengatakan para sindikat perdagangan manusia menipu para korban untuk diajak bekerja di luar negeri sebagai buruh paruh waktu dengan gaji yang tinggi namun pada kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai buruh paksa dan prostitusi. Sebagian dari mereka diperdagangkan untuk dijadikan istri dan sebagian lainnya diperdagangkan untuk

melahirkan di Cina atau diambil organ tubuhnya untuk dijual. Perdagangan manusia menduduki peringkat ketiga paling besar sebagai sumber pendapatan untuk kejahatan yang terorganisir setelah perdagangan senjata dan narkoba menurut organisasi anti perdagangan (Quy 2020).

Ha Thi Nga, ketua dari Vietnam Women's Union mengatakan target utama para sindikat perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan yang dekat dengan perbatasan di mana mereka hidup dalam kemiskinan dan hanya mendapatkan sedikit akses untuk pendidikan dan media sosial. Ha Thi Nga juga menambahkan sebagian dari pelaku perdagangan manusia adalah mereka yang pernah menjadi korban perdagangan manusia (Quy 2020).

2.2 Dampak dari Penerapan Kebijakan Perdagangan Manusia oleh Pemerintah Vietnam

Secara ideal, untuk mengukur dampak dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari bertambah atau berkurangnya jumlah korban. Namun dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam penulis menemukan dua hal yang berbeda. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam dinilai cukup serius untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia yang selama ini terjadi di Vietnam (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Pemerintah Vietnam mengajak serta organisasi, lembaga dan individu dalam pencegahan dan pemberantasan kasus perdagangan manusia yang terjadi.

Mereka juga memberikan informasi dan pengetahuan tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Namun, pada penerapannya banyak sekali pihak yang mengkritik kinerja Pemerintah Vietnam dalam penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah Vietnam dianggap tidak serius dan juga Pemerintah Vietnam dinilai tidak memenuhi standar dalam memutus kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Pada kenyataannya jumlah kasus perdagangan manusia di Vietnam mengalami penurunan yaitu, pada tahun 2017 terdapat 670 kasus dan pada 2018 mengalami penurunan hingga menjadi 490 kasus perdagangan manusia, namun sebagian sumber mengatakan bahwa kasus perdagangan manusia di Vietnam terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tidak ada lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mengeluarkan jumlah korban perdagangan manusia secara jelas. Hal ini juga disebabkan karena Pemerintah Vietnam sendiri tidak memberikan informasi yang jelas terkait jumlah korban dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Selain itu, Pemerintah Vietnam juga tidak mengklasifikasikan jumlah korban berdasarkan dengan jenis-jenis perdagangan manusia (U.S. State Department of State 2020).

Walaupun pemerintah Vietnam telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang pencegahan perdagangan manusia di negaranya, namun beberapa negara tetap menganggap Pemerintah Vietnam tidak serius dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya, pertentangan ini terjadi

ketika ditemukannya 39 warga Vietnam yang tewas dalam sebuah kontainer di Inggris (Peltier 2019).

Salah satu negara yang menganggap Pemerintah Vietnam tidak serius adalah Inggris. Duta Besar Inggris untuk Vietnam Gareth Ward telah memperingatkan kepada Pemerintah Vietnam bahwa potensi bahaya untuk para korban sangatlah jelas. Namun, Pemerintah Vietnam merespon tanggapan Gareth Ward, mereka mengatakan bahwa Pemerintah Vietnam telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Cina untuk meningkatkan kesadaran akan korban perdagangan manusia. Walaupun Pemerintah Vietnam membuat usaha yang signifikan dalam memberantas perdagangan manusia, namun menurut U.S Embassy, Pemerintah Vietnam dianggap tidak memenuhi standar minimal dalam penanganan perdagangan manusia (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Dalam laporannya U.S Embassy menemukan bahwa Pejabat Vietnam terutama yang berada di tingkat kelompok desa terlibat dalam memfasilitasi perdagangan dan mengeksploitasi para korban dengan menerima suap dari para sindikat perdagangan manusia dan memeras uang sebagai imbalan untuk mempersatukan korban dengan keluarganya (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Para korban yang telah kembali ke rumah mereka mengalami kesulitan dalam membangun kehidupan mereka dan bergabung kembali kepada komunitas yang ada di Vietnam. Terutama mereka yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, mereka harus menghadapi stigma sosial yang besar dalam masyarakat

Vietnam. Pandangan-pandangan dan perilaku buruk dari para tetangga dan masyarakat sekitar menjadi sebuah tantangan yang besar bagi para korban dalam penyembuhan trauma yang mereka terima. Hal ini akan sangat berdampak kepada masalah psikologis korban (Nguyen 2019).

Dalam penerapan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Vietnam, penerapannya tidak berjalan secara maksimal. Masih banyak korban yang telah kembali ke rumahnya tidak mendapatkan dukungan dan perlindungan sebagaimana yang telah dituliskan dalam Law No.66/2011/QH12 bahwa pemerintah mengajak masyarakat, lembaga dan organisasi harus melindungi korban dan memberikan dukungan moral kepada para korban. Selain itu, pemerintah Vietnam juga gagal dalam memberikan pengetahuan, informasi dan menjalin komunikasi kepada para masyarakat, lembaga dan organisasi tentang kewajiban mereka untuk memberikan pertolongan, perlindungan dan dukungan untuk para korban perdagangan manusia (United Nation 2011).

Pemerintah Vietnam juga gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warganya yang menjadi korban perdagangan manusia di Inggris, sehingga mereka harus kehilangan nyawanya. Dalam kasus ini Pemerintah Vietnam belum bisa menerapkan *personal security* untuk melindungi warganya. Pada penerapannya Pemerintah Vietnam kurang maksimal dalam mengawasi penerapan kebijakan tersebut, sehingga pada tahun 2019 posisi Vietnam dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia masuk kepada *Tier 2 Watch List* di mana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi standar peraturan TVPA, namun

pemerintah terus berupaya untuk memenuhi standar peraturan TVPA (U.S. State Department of State 2020).

Kedudukan Vietnam dalam *tier 2 watch list* adalah sebuah penurunan bagi Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya, Vietnam sendiri di tahun 2018 berada dalam tingkatan *tier 2* yang mana Pemerintah Vietnam dianggap mampu dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi saat itu, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dianggap mampu untuk menangani kasus perdagangan manusia (U.S. Department of State n.d.).

Berbeda dengan *tier 2 watch list* dalam kedudukan ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dianggap tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*). Posisi *Tier 2 Watch List* merupakan posisi yang cukup darurat dalam menangani kasus perdagangan manusia, posisi ini termasuk kedalam kedua terendah. Terdapat tiga kriteria tambahan di mana negara termasuk kedalam *tier 2 watch list*, diantaranya adalah:

1. Jumlah mutlak korban dari bentuk perdagangan yang parah meningkat secara signifikan.
2. Terdapat kegagalan dalam memberikan bukti peningkatan upaya yang sudah dilakukan untuk menangani kasus perdagangan manusia dari tahun sebelumnya.
3. Penentuan bahwa suatu Negara melakukan upaya yang signifikan dalam menyesuaikan dirinya (Negara) dengan standar minimum

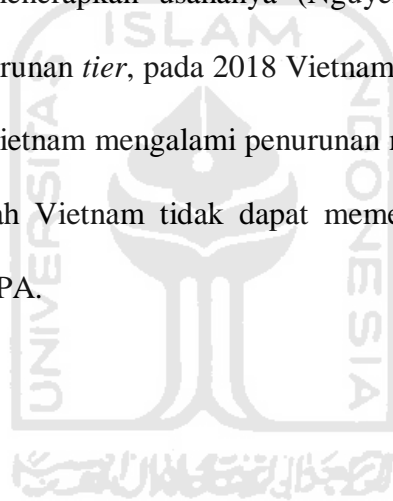
berdasarkan kepada komitmen Negara dalam mengambil langkah-langkah tambahan di masa depan, selama satu tahun kedepan (U.S. Department of State n.d.).

Terdapat beberapa jenis *tier* dalam klasifikasi tingkatan upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia, diantaranya adalah *pertama, tier 1* dalam tingkatan ini negara-negara dengan pemerintah yang dapat memenuhi standar minimum *Trafficking Victims Protection Act's* (TVPA). *Kedua, tier 2* dalam tingkatan ini negara –negara dengan pemerintah yang tidak dapat memenuhi standar minimum dalam TVPA namun pemerintahnya terus mengupayakan untuk memenuhi standar minimum dari TVPA. *Ketiga, tier 2 watch list* merupakan posisi yang cukup darurat dalam menangani kasus perdagangan manusia, posisi ini termasuk kedalam kedua terendah. Terdapat tiga kriteria tambahan dimana negara termasuk kedalam *tier 2 watch list*. *Keempat, tier 3* ini adalah tingkatan terakhir dari klasifikasi ini. Dalam *tier* ini pemerintah tidak memenuhi standar minimum dari TVPA dan mereka tidak memiliki upaya yang signifikan dalam memenuhinya (U.S. Department of State n.d.).

Saat ini posisi Vietnam berada pada *tier 2 watch list*, artinya apabila Pemerintah Vietnam masih belum bisa menangani kasus perdagangan manusia dengan baik seperti kasus yang terjadi di Inggris pada 2019 lalu terulang kembali, ketika 39 orang warga Vietnam ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah truk kontainer dan mereka yang meninggal adalah korban *human trafficking* (Peltier 2019) maka kemungkinan besar posisi Vietnam akan diklasifikasikan ke dalam *tier 3*. Artinya, Pemerintah Vietnam tidak memenuhi standar minimum dari

TVPA dan Pemerintah Vietnam tidak serius dalam menangani perdagangan manusia di negaranya, yang sampai saat ini masih terus berlanjut.

Pada bab ini menjelaskan tentang usaha Pemerintah Vietnam dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia yang sampai saat ini masih terjadi di negaranya. Pemerintah Vietnam telah melakukan berbagai macam upaya dalam menangani kasus perdagangan manusia yang masih terjadi di negaranya. Namun, dalam usahanya tersebut Pemerintah Vietnam banyak mendapatkan kritikan dari beberapa negara tentang usaha yang telah mereka lakukan. Pemerintah Vietnam dianggap gagal dalam menerapkan usahanya (Nguyen 2019). Hal ini bisa diperlihatkan dengan penurunan *tier*, pada 2018 Vietnam berada pada posisi *tier 2* namun pada tahun 2019 Vietnam mengalami penurunan menjadi *tier 2 watch list*, pada posisi ini Pemerintah Vietnam tidak dapat memenuhi standar penanganan yang dikeluarkan oleh TVPA.



BAB III
PENERAPAN *PERSONAL SECURITY* DALAM KEBIJAKAN
PEMERINTAH VIETNAM

Dalam menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam penulis menggunakan konsep *Human Security* dengan pendekatan *Personal Security*. *Human Security* berbicara bahwa keamanan tidak hanya untuk negara saja, melainkan setiap individu yang terdapat di negara tersebut dan negara wajib untuk melindungi mereka. *Human security* merupakan sebuah konsep yang baru diterapkan oleh Pemerintah Vietnam. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya pengakuan konsep tersebut dari pemerintah maupun media mainstream lainnya (Lan 2015).

Human security sendiri memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan, dan bahwa setiap manusia khususnya orang-orang yang renta berhak atas kebebasan dari rasa takut dan dari keinginan, dengan kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak mereka dan mengembangkan potensi kemanusiaan mereka sepenuhnya. (United Nations 2005)

Dalam *human security* terdapat tujuh pendekatan, diantaranya adalah, *economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security dan political security*. Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan pendekatan *personal security* (United Development Programme 1994).

3.1 *Personal Security* Sebagai Konsep

Personal Security merupakan salah satu dari tujuh pendekatan yang terdapat dalam *human Security*, *personal security* melindungi kelompok-kelompok rentan dari kekerasan dan perampasan kebebasan dasar. Kelompok-kelompok rentan yang dimaksud adalah anak-anak dan perempuan. Menteri Keamanan Publik Vietnam menyampaikan bahwa laporan tentang perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak-anak dan perempuan menjadi lebih rumit dan ancaman ini tidak hanya untuk Vietnam, namun juga secara global (Lan 2015, 8-9)

Personal security memuat bagaimana manusia juga memiliki isu-isu yang dapat mengancam keamanan individunya, salah satu diantaranya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia sangat mengancam keamanan setiap individu, hal ini disebabkan setiap individu yang diperdagangkan kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Mereka juga mendapatkan perlakuan yang buruk, negara tidak dapat melindungi mereka dan keamanan individu mereka terancam. Perdagangan manusia menjadi suatu permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani, karena kasus ini mengancam keamanan dan keselamatan setiap individu yang menjadi korban dari kasus tersebut. *Personal security* sangat melindungi keamanan setiap individu, dalam *personal security* keamanan individu sangat penting dan negara wajib melindungi keamanan setiap warga negaranya (United Development Programme 1994, 30)

Personal security memiliki kriteria penerapannya sendiri, kriteria tersebut dikeluarkan oleh UNDP yang diantaranya adalah tidak adanya kekerasan secara

fisik maupun non-fisik, pelecehan seksual, intimidasi, dan kejahatan kriminal. *Personal security* juga memiliki pola-pola yang cukup penting mengenai hak-hak dasar dan kebebasan dalam kehidupan manusia secara individu. Menurut *personal security* kehidupan manusia semakin terancam oleh ancaman-ancaman yang tak terduga. Ancaman tersebut meliputi:

1. Ancaman dari Negara (penyiksaan fisik)
 2. Ancaman dari Negara lain (perang)
 3. Ancaman dari grup-grup masyarakat (ketegangan etnis)
 4. Ancaman dari individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya (kejahatan, kekerasan jalanan)
 5. Ancaman yang ditujukan kepada perempuan (pemeriksaan, kekerasan domestik)
 6. Ancaman terhadap diri sendiri (bunuh diri, penggunaan obat-obatan)
- (United Development Programme 1994, 30).

Menurut UNDP juga anak-anak dan Perempuan wajib untuk dilindungi. Karena rata-rata korban dari kejahatan dan kekerasan adalah anak-anak dan perempuan. Mereka termasuk ke dalam kelompok rentan yang harus dilindungi, sekalipun oleh negara (United Development Programme 1994, 31).

3.2 Kebijakan Pemerintah Vietnam dan Pencapaian Personal Security dalam Menangani *Human Trafficking*

Pemerintah Vietnam memiliki satu kebijakan yang tertulis dan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Vietnam untuk mengatasi kasus

perdagangan manusia yang telah terjadi di negaranya, kebijakan ini adalah Law No. 66/2011/QH12. Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah tidak hanya untuk mencegah dan mengatasi perdagangan manusia saja, namun kebijakan tersebut juga memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan manusia dan memberikan jaminan kepada mereka.

Dalam Law No. 66/2011/QH12 menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus *human trafficking* yang terjadi di negaranya. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia dan tindakan lain yang melanggar hukum atau undang-undang tentang pemberantasan perdagangan manusia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penerimaan, verifikasi, perlindungan dan dukungan untuk para korban perdagangan manusia (United Nation 2011).

Pasal-pasal yang terdapat dalam Law No.66/2011/QH12 terlihat sangat memihak kepada warga Vietnam dan Pemerintah Vietnam berusaha untuk melindungi setiap warga negaranya. Pemerintah, kementerian, sektor dan daerah serta masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Secara garis besar undang-undang tersebut sudah menerapkan *personal security*, di mana dalam undang-undang tersebut Pemerintah Vietnam mengajak setiap warga negaranya untuk memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan manusia, dan Pemerintah Vietnam juga memperhatikan keselamatan setiap warga negaranya. Selain itu, Pemerintah

Vietnam berusaha untuk mencegah terjadinya kasus perdagangan manusia agar tidak terulang lagi di negaranya (United Nation 2011).

Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan tentang upaya Pemerintah Vietnam dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri. Pasal-pasal yang telah disebutkan pada bab dua telah menjelaskan tentang upaya pemerintah bersama dengan masyarakat dan pemerintah daerah serta organisasi setempat dalam memberikan perlindungan kepada para korban yang telah selamat dan kembali kepada keluarganya. Dalam kebijakan ini Pemerintah Vietnam telah menerapkan konsep *personal security* dalam kebijakannya (United Nation 2011).

Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Vietnam sebagian besar sudah mencerminkan dan berlandaskan pada *personal security*, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Law No.66/2011/QH12 sangat melindungi para masyarakatnya yang menjadi korban perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam juga berupaya melindungi segenap masyarakatnya dari perdagangan manusia. Peraturan perundang-undangan Vietnam dalam menangani perdagangan manusia sudah mencerminkan penerapan *personal security* itu sendiri, seperti apa yang ditulis oleh UNDP bahwa setiap individu atau kelompok harus terbebas dari tindak kriminal (United Development Programme 1994, 30).

Hal ini seperti yang tertulis dalam Law No.66/2011/QH12 bahwa Pemerintah Vietnam bersama para Menteri-menteri dan pemerintah sektor dan lokal bertanggungjawab untuk mencegah dan melawan perdagangan manusia

yang terjadi di negaranya, Pemerintah Vietnam juga tidak segan untuk memberikan hukuman kepada para aktor-aktor atau sindikat perdagangan manusia (United Nation 2011).

Namun pada penerapannya Pemerintah Vietnam belum cukup baik dalam menerapkan *personal security* di negaranya. Hal ini bisa dilihat dari kecemasan-kecemasan dan kritikan yang dilontarkan oleh beberapa negara diantaranya adalah Inggris dan Amerika tentang penanganan kasus perdagangan manusia yang sedang diselesaikan oleh Pemerintah Vietnam. Negara-negara tersebut mengkritik Pemerintah Vietnam karena dianggap tidak dapat menyelesaikan kasus perdagangan manusia dengan baik dan Pemerintah Vietnam dinilai cukup lamban dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia (Nguyen 2019).

3.3 Penerapan *Personal Security* Terhadap Kebijakan Pemerintah Vietnam dalam Menangani *Human Trafficking*

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Vietnam sudah memenuhi standar penerapan *personal security*. Dalam kebijakan yang telah dibuat Pemerintah Vietnam berusaha untuk mencegah dan melindungi keamanan dan memberikan hak-hak warga negaranya baik mereka yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya mereka yang berada di luar negeri dan menjadi korban dari perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam dalam kebijakannya sangat peduli kepada para korban (United Nation 2011).

Pemerintah Vietnam dalam kebijakannya berusaha untuk melindungi para warganya yang menjadi korban perdagangan manusia, selain itu Pemerintah

Vietnam juga menjamin keamanan dan perlindungan warganya saat kembali ke Vietnam. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Vietnam belum bisa memberikan atau menerapkan kebijakannya secara penuh. Pemerintah Vietnam dalam penerapan kebijakannya juga belum bisa menerapkan *personal security* dengan baik (United Nation 2011).

Dalam penerapan *personal security* pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek, diantaranya adalah keamanan, keselamatan dan pemberian hak-hak dasar kepada setiap warganya. Namun dalam hal ini Pemerintah Vietnam belum bisa menerapkan *personal security* dengan baik, walaupun dalam kebijakannya Pemerintah Vietnam terlihat sangat peduli dengan keselamatan dan keamanan warga negaranya. Hal ini terlihat dari kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang 2016-2020. Dalam penerapannya Pemerintah Vietnam masih lengah dalam menjalankan kebijakannya. Tak banyak dari masyarakat Vietnam yang tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang telah mereka terbitkan.

Salah satu contoh kasusnya adalah saat ditemukannya 39 orang yang meninggal dalam sebuah truk kontainer di London pada tahun 2019 lalu. Kasus ini membuat Pemerintah Vietnam mendapatkan banyak kecaman dan kritikan dari beberapa negara, khususnya Pemerintah Inggris (Peltier 2019). Karena kasus ini juga beberapa negara seperti Inggris dan Amerika mempertanyakan bagaimana penerapan *human security* di Vietnam khususnya penerapan *personal security*-nya dalam mengatasi kasus *human trafficking* yang masih terjadi di Vietnam. Dalam

kasus ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Vietnam belum bisa menerapkan *personal security* dengan baik dalam penerapan kebijakannya (Nguyen 2019).

Dalam kasus ini juga Pemerintah Vietnam tidak dapat melindungi keamanan warga negaranya, hal ini tidaklah sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam *personal security*. Vietnam dianggap lalai dalam melindungi keamanan warga negaranya. Kejadian tersebut menjadi sebuah teguran yang sangat keras untuk Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia yang masih terjadi di negaranya. Karena kasus ini juga posisi Vietnam dalam menangani perdagangan manusia menjadi turun peringkat, dari yang sebelumnya berada pada *tier 2* saat ini Vietnam berada pada *tier 2 watch list*. Dalam kasus yang terjadi, lagi-lagi Pemerintah Vietnam belum dapat menjalankan dan menerapkan *personal security* untuk melindungi warga negaranya (U.S. Embassy & Consulate in Vietnam 2019).

Tidak hanya pada kasus di atas saja, masih ada kasus-kasus lain yang menggambarkan penerapan *personal security* yang tidak berjalan dengan efektif di Vietnam. Kasus lainnya adalah, masih banyak perempuan Vietnam yang dijual ke Cina untuk dijadikan budak seks atau mereka akan dinikahkan secara paksa kepada laki-laki Cina. Banyak perempuan atau anak-anak perempuan Vietnam yang dijual ke Cina dengan alasan untuk meningkatkan taraf ekonomi, dan membantu perekonomian di keluarga mereka (Nga 2020).

Sedangkan banyak perempuan yang dijual ke Cina alasannya adalah karena Pemerintah Cina menerapkan kebijakan '*One Child Policy*' di negaranya

dan orangtua di Cina lebih memilih untuk melahirkan anak laki-laki daripada anak perempuan, kedua alasan inilah yang menyebabkan meningkatnya kasus perdagangan perempuan ke Cina (Nga 2020). Dalam kasus ini, lagi-lagi negara tidak dapat melindungi keamanan warga negaranya. Pemerintah Vietnam juga tidak dapat memberikan jaminan hidup dan kesejahteraan kepada setiap masyarakatnya seperti yang telah tertulis dalam Law No.66/2011/QH12 (United Nation 2011).

Selain dua kasus di atas, Pemerintah Vietnam juga tidak memiliki lembaga khusus yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), mereka juga tidak memiliki lembaga yang secara khusus melindungi anak dan perempuan (Thontowi 2019, 119). Hal ini sangat jelas Pemerintah Vietnam masih abai dalam melindungi warga negaranya. Mereka hanya mengajak setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk saling melindungi dan memberikan hak-hak kepada para korban, namun Pemerintah Pusatnya pun tidak memiliki lembaga khusus terkait perlindungan manusia. Hal ini bisa dilihat bahwa Pemerintah Vietnam masih belum bisa melaksanakan atau menerapkan *personal security* dengan baik di setiap penerapan kebijakannya (United Nation 2011).

Secara garis besar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam sudah sesuai dengan konsep-konsep dasar dari *personal security* bahwa setiap individu harus terbebas dari tindak kriminal apapun bentuknya itu (United Development Programme 1994), namun pada penerapannya masih sangat jauh dari apa yang dimaksudkan oleh *personal security*.

3.3 Tabel Analisis Kasus

No.	Jenis Kasus	Kebijakan	Temuan
1.	Perdagangan manusia ke London (ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa).	Pasal Empat ayat satu sampai lima.	Pemerintah belum bisa melindungi setiap warga negaranya serta pemerintah kecolongan dengan adanya kasus tersebut.
2.	Perdagangan perempuan ke China untuk <i>force marriage</i> .	Pasal Empat ayat satu sampai lima.	Pemerintah belum bisa mencegah perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan yang terjadi di negaranya.
3.	Pemerintah Vietnam belum memiliki Komisi Perlindungan HAM.	Pasal tujuh dan delapan.	Pemerintah hanya mengajak saja namun tidak memberikan ruang untuk melindungi para korban.

Hal ini dibuktikan dengan masih banyak warga Vietnam yang menjadi korban tindak kriminal perdagangan manusia, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip UNDP dan *personal security*. Jadi, sampai saat ini Pemerintah Vietnam belum bisa menerapkan konsep-konsep dari *personal security* dengan baik, karena masih banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam sampai saat ini, seperti yang terjadi di Inggris pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Vietnam belum bisa mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya (Peltier 2019).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini menjelaskan tentang upaya atau kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya yang dilihat melalui konsep *human security* terutama dalam aspek *personal security*. Dalam kasus perdagangan manusia yang paling terancam adalah keselamatan dan keamanan manusia itu sendiri kedua aspek ini termasuk kedalam *personal security*. Rumusan masalah yang akan penulis jawab dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan *human security* yang dilakukan pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya.

Dalam skripsi ini penulis menemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani perdagangan manusia yang terjadi saat ini. Namun, hanya ada satu upaya yang menerapkan konsep *personal security* dalam kebijakannya. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani perdagangan manusia tertulis dalam Law No.66/2011/QH12. Kebijakan tersebut mengatur tentang upaya Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan melawan kasus perdagangan manusia. Dalam perundang-undangan tersebut juga menjelaskan perlindungan terhadap para korban, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam sangat mempertimbangkan aspek *personal security*, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam Law No.66/2011/QH12. Setiap pasal yang terdapat

dalam undang-undang tersebut sangat mempertimbangkan aspek *personal security*. Pemerintah Vietnam juga sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan setiap warga negaranya. Pemerintah Vietnam mengajak setiap warganya untuk melindungi dan menerima kehadiran para korban perdagangan manusia yang selamat dan telah kembali kepada keluarganya. Pemerintah juga menyiapkan *shelter* penampungan untuk para korban perdagangan manusia yang baru saja kembali ke Vietnam.

Namun, pada penerapan kebijakannya elemen atau indikator dari *personal security* belum ditemukan dalam penerapan kebijakan Pemerintah Vietnam. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu yang lalu yaitu pada tahun 2019 lalu ditemukan sebanyak 39 orang warga Vietnam yang meninggal dunia di dalam truk kontainer di London. Penulis masih menemukan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Vietnam. Selain itu, Pemerintah Vietnam juga mendapatkan kritikan dari beberapa negara yaitu Amerika dan Inggris kedua negara ini mengatakan bahwa Pemerintah Vietnam sangat lamban dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya. Pemerintah Vietnam juga belum bisa menjamin keselamatan dan keamanan warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Penerapan *personal security* juga dikatakan gagal karena posisi Vietnam pada tahun 2019 berada pada *tier 2 watch list* yang berarti upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam menangani kasus perdagangan manusia dianggap tidak memenuhi standar yang diterapkan oleh TVPA secara penuh. Sebelumnya, pada tahun 2016-2018 posisi Vietnam berada pada *tier 2*, di mana Pemerintah

Vietnam terus berupaya dalam menangani kasus perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam juga tidak memiliki lembaga yang secara khusus melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), mereka juga tidak memiliki lembaga khusus yang melindungi perempuan dan anak-anak. Secara garis besar Pemerintah Vietnam dianggap masih belum bisa menerapkan *personal security* dengan baik dan secara penuh.

4.2 Rekomendasi

Dalam skripsi ini penulis masih belum maksimal dalam melakukan penelitian. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan yang tersaji dalam skripsi ini, baik dari pengumpulan data, kebijakan-kebijakan dan penerapan konsep. Apabila ada kedepannya ada penelitian yang sama atau pembahasan yang menyerupai penelitian ini, maka saran penulis adalah penelitian berikutnya dapat meneliti dari sisi keamanan ekonominya. Karena, sampai saat ini korban dari perdagangan manusia disebabkan oleh lemahnya keamanan ekonomi di Vietnam dan banyak dari mereka yang diimingi pekerjaan yang enak dengan gaji yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Louise. "Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia." 75-76. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kranrattanasuit, Naparat. *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand and Vietnam*. Boston: Brill Nijhoff, 2014.
- Lan, Pham Lan Dung and Nguyen Ngoc. "The Concept of Human Security in Vietnam." *JICA-RI Working Paper*, 2015: 8-9.
- Larsen, Jacqueline Joudo. *The Trafficking of Children in the Asia Pacific*. April 2011. <https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi415>.
- Lovett, Lorcan. *Vietnam Wakes Up to its Human Trafficking Problem*. September 2, 2016. <https://www.thenewhumanitarian.org/news/2016/09/02/vietnam-wakes-its-human-trafficking-problem>.
- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. *Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand*. January 2016. <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/62675-Progress-on-Combating-Human-Trafficking-in-Thailand.html>.
- Muhammad, KH Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Nusa Media, 2015.
- NcMara, Annie Kelly and Mei-Ling. *3,000 Children Enslaved in Britain After Being Trafficked from Vietnam*. May 23, 2015. <https://www.theguardian.com/global-development/2015/may/23/vietnam-children-trafficking-nail-bar-cannabis>.
- Nga, Pham. *VN EXPRESS INTERNATIONAL*. September 16, 2020. <https://e.vnexpress.net/news/life/trend/teen-trafficked-to-china-finds-way-home-after-a-decade-4159238.html> (accessed October 02, 2020).
- Nguyen, Thoi. "Vietnam's Human Trafficking Problem Is too Big to Ignore." *The Diplomat*. November 08, 2019. <https://thediplomat.com/2019/11/vietnams-human-trafficking-problem-is-too-big-to-ignore/>.

- Paul Battersby, Joseph M. Siracusa. *Globalization and Human Security*. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
- Peltier, Megan Specia and Elian. *The New York Times*. October 24, 2019. <https://www.nytimes.com/2019/10/24/world/europe/truck-bodies-uk-chinese.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article> (accessed October 10, 2020).
- Persaud, Randolph B. "Human Security." In *Contemporary Security Studies*, by Alan Collins, 140. New York: Oxford University Press, 2013.
- Quy, Nguyen. *Human Trafficking Cases Down But Not Out in Vietnam*. August 01, 2020. <https://e.vnexpress.net/news/news/human-trafficking-cases-down-but-not-out-in-vietnam-4139200.html> (accessed September 10, 2020).
- Rudi, Teuku May. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- State, U.S Department of. *2018 Trafficking in Persons Report*. July 06, 2018. <https://vn.usembassy.gov/2018-trafficking-persons-report/> (accessed June 05, 2020).
- Thanh Nien News. *3 Vietnamese Rescued as UK Cracks Down on Modern Slavery: Report*. June 7, 2016. <https://m.thanhniennews.com/society/3-vietnamese-rescued-as-uk-cracks-down-on-modern-slavery-report-62925.html>.
- Thontowi, Jawahir. "Perjanjian Internasional dan HAM Dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN." In *Perjanjian Internasional dan HAM Dalam Konstitusi Negara-Negara ASEAN*, by Jawahir Thontowi, 119. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- U.S. Departmen of State. *2018 Trafficking in Persons Report: Vietnam*. 2018. <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/vietnam/> (accessed September 07, 2020).
- U.S. Department of State. *state.gov*. n.d. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/271339.pdf> (accessed Oktober 02, 2020).
- U.S. Embassy & Consulate in Vietnam. *2019 Trafficking in Persons Report*. June 21, 2019. <https://vn.usembassy.gov/2019-trafficking-persons-report/> (accessed September 24, 2020).

U.S. State Department of State. *state.gov*. 2020. <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/vietnam/> (accessed September 30, 2020).

United Development Programme. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press, 1994.

United Nation. "Vietnam Law on Human Trafficking Prevention and Combat." *UN ACT*. March 29, 2011. <http://un-act.org/publication/view/viet-nams-law-on-human-trafficking-prevention-and-combat-2011/> (accessed August 08, 2020).

United Nations. "2005 World Summit Outcome." *Refworld*. October 24, 2005. <https://www.refworld.org/docid/44168a910.html> (accessed September 08, 2020).

Combating Human Trafficking in Asia: A Resources Guide to Internatioanal an Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices. New York: United Nations, 2003.

